



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. H. Agus Salim Telp. 0756-22161, Fax-0756-22661

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 360 / 62 / BPBD-PS/2021

T E N T A N G
PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP
JASA TENAGA KEBERSIHAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Dukumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA 1.05.01.2.02.02.5.1.02.01.0030 Mata Anggaran Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Keuangan;
 - b. bahwa untuk membantu Kelancaran Pelaksanaan Tugas perlu ditunjuk dan ditetapkan Pegawai Tidak Tetap sebagai Jasa Tenaga Kebersihan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa personil yang namanya tersebut pada daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki posisi sebagai Jasa Tenaga Kebersihan ;
 - d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang – Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentag Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 pada lampiran Keputusan ini, sebagai Jasa Tenaga Kebersihan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban sebagai Jasa Tenaga Kebersihan sebagaimana tercantum pada lajur 6 daftar lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tersebut didebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Painan
Pada tanggal : 20 Januari 2021

Kepala Pelaksana,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Bupati Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Sdr., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 360 / 02 / BPBD-PS/2021
 TANGGAL : 20 Januari 2021
 TENTANG : PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP JASA TENAGA KEBERSIHAN DILINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

No.	NAMA / NIP		JABATAN	JABATAN DALAM SK	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
	PANGKAT	GOLONGAN			
1	2	3	4	5	6
1.	SRI YULIANTI, A.Md	T H L	Staf Sekretariat	Pramu Kantor	1. Melayani Kebutuhan Kerumah Tanggaan Kantor 2. Menjaga Keamanan serta Kebersihan Kantor
2.	LIVIA WIDYA NINGSIH	T H L	Staf Bidang RR	Pramu Kantor	3. Melaporkan Pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai pertanggung jawaban 4. Melaksanakan Tugas kedinasan Lain yang diperintahkan oleh Atasan baik lisan maupun tertulis
3.	BAMBANG SEPRIANTO	T H L	Staf Bidang KL	Penjaga Piket Kantor	1. Melakukan Piket Penjagaan sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan di lingkungan kantor dalam rangka ketertiban dan keamanan lingkungan kantor.
4.	ADE SAPUTRA, S.IP	T H L	Staf Sekretariat	Penjaga Piket Kantor	2. Mengidentifikasi keluar masuk tamu di lingkungan kantor. 3. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai pertanggung jawaban. 4. Melaksanakan Tugas kedinasan Lain yang diperintahkan oleh Atasan baik lisan maupun tertulis
5.	DEDEN LESMANA	T H L	Staf Bidang KL	Petugas Kebersihan	1. Melaksanakan dan menjaga kebersihan lingkungan kantor
6.	KRISTIA MONICA ZAHRA	T H L	Staf Bidang KL	Petugas Kebersihan	2. Memelihara Peralatan kebersihan yang ada agar terawat dan selalu dapat digunakan 3. Melaporkan Pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai pertanggung jawaban 4. Melaksanakan Tugas kedinasan Lain yang diperintahkan oleh Atasan baik lisan maupun tertulis

Paman, Januari 2021
 Kepala Pelaksana,
 BADAN
 PENANGGULANGAN
 BENCANA
 DAERAH

H. H. HERMAN BUDIARTO
 Pembina Muda NIP. 19670103 198203 1 010